

COORDINATION OF SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TO HANDLING OF HYGIENE AREA IN THE CITY OF PEKANBARU

SARAH AMIR DAN ZAILI RUSLI

Fisip Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

e-mail: sarah_eorendil@yahoo.com

CP: 082169444554

Abstract: Coordination of Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) to Handling of Hygiene Area In The City of Pekanbaru. This study was conducted to see how coordination of Coordination of Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) to Handling of Hygiene Area In The City of Pekanbaru. Based on the results of research conducted, implementation of Coordination of Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) to Handling of Hygiene Area In The City of Pekanbaru has not done well, because state agencies that are horizontal, coordination can be seen from both the accountability indicators, process, setting regularly, unity of action, and the goal has not been well categorized. Of which there are 5 (five) indicators of coordination, which is 4 (four) indicators met, and 1 (one) indicators has not been met. There are several factors inhibiting coordination of Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) to handling of Hygiene area in the city of Pekanbaru the limited numbers of personel, lack of supervision in the field, discipline hygiene aparattus, the apparattus is still low motivation, lack of hygiene facilities and infrastrucatur as well as lack of awareness of the public to participate in protecting the environment.

Keywords: *Coordination, Clean, Organization*

PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan di Indonesia saat ini berjalan dengan sangat pesat. Ini tidak terlepas dari perkembangan demokrasi yang menyebabkan adanya tuntutan dari masyarakat agar Pemerintah memenuhi tugas dan tanggung jawab untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Berakhirnya masa Orde Baru juga telah mengubah dasar-dasar penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Salah satunya adalah terjadinya perubahan sistem Pemerintahan yang dahulunya bersifat sentralistik menjadi desentralistik yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri guna tercapainya kesejahteraan masyarakat terutama pelaksanaan pembangunan dan partisipasi masyarakat, yang biasa disebut dengan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 13 dan 14, begitu juga amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada dasarnya fungsi utama yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan urusan wajib yang pada hakekatnya merupakan bagian dari pelayanan publik. Oleh karena itu, maka pelayanan publik untuk kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan penyelenggara pembangunan serta pendayagunaan aparatur Negara yang berkualitas, efektif, efisien dan berwibawa.

Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 5 menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Dalam pelaksanaan pembangunan selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan seperti masalah sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan ketertiban umum.

Salah satu permasalahan yang mendasar pada Pemerintah Kota Pekanbaru adalah masalah sosial, terutama masalah penanggulangan dan pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Ini terlihat dengan jumlah volume sampah yang ada di Kota Pekanbaru yang semakin lama semakin meningkat. Dapat dilihat dari tabel I.1 berikut ini:

Tabel 1.1: Jumlah Volume Sampah di Kota Pekanbaru Periode 2010-2012

| No | Tahun | Volume Sampah |
|----|-------|----------------|
| 1 | 2010 | 53.485,550 Ton |
| 2 | 2011 | 78.773,280 Ton |
| 3 | 2012 | 99.265,125 Ton |

Sumber: TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru (2013)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah volume sampah pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Jumlah volume sampah di Kota Pekanbaru tahun 2010 sebanyak 53.485,550 Ton, sedangkan volume sampah di tahun 2012 mengalami peningkatan dengan jumlah 99.265,125 Ton. Penumpukan sampah paling besar terjadi di jalan-jalan protokol maupun dipemukiman padat penduduk. Selanjutnya, sistem penanganan sampah di Kota Pekanbaru yang masih mengikuti pola konvensional mulai dari kegiatan penyapuan jalan, pewardahan, pengumpulan sampah, penampungan sampah sementara di TPS dan pengangkutan sampah ke TPA Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru juga menambah permasalahan mengenai penanganan kebersihan ini. Untuk dapat menanganani dan mengelola kebersihan yang lebih efektif serta untuk dapat menciptakan kebersihan di lingkungan Kota Pekanbaru, maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud perlu ditindaklanjuti dengan membentuk suatu kelembagaan pengelolaan kebersihan dengan melibatkan institusi-institusi yang terkait. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, maka diharapkan akan tercapai pula tujuan serta sasaran yang telah tertuang dalam Keputusan Walikota Nomor 7 Tahun 2004.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru sebagai koordinator kebersihan di Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Sasaran Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 tahun 2008 tentang susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

Dalam Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, secara khusus yang bertanggung jawab soal kebersihan di Kota Pekanbaru adalah bidang kebersihan kota. Bidang Kebersihan Kota mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan penanganan kebersihan di Kota Pekanbaru. Dengan melibatkan banyak instansi serta institusi, maka diperlukan sinergisme yang kuat antar instansi dan institusi terkait sehingga model penanganan kebersihan terpadu yang telah diciptakan dapat menjamin proses penanganan kebersihan yang maksimal, simultan dan

terkoordinir dengan baik. Oleh karenanya, perlu juga ada proses koordinasi antar instansi serta institusi terkait sehingga mendapatkan pembagian kerja yang jelas sebagai upaya dari proses pencapaian keberhasilan penanganan kebersihan di Kota Pekanbaru. Meskipun koordinasi antar badan/instansi dengan unit-unit yang fungsinya berbeda, tapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan, baik secara internal atau eksternal yang levelnya setara. Oleh karena itu, koordinasi yang diharapkan tentunya koordinasi yang mana dapat menyatukan tindakan dan pengarahannya yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat. Dalam proses pengelolaan kebersihan terutama sampah yang dilaksanakan Kota Pekanbaru, khususnya oleh 3 (tiga) instansi yang tercantum dalam Keputusan Walikota Nomor 7 Tahun 2004, banyak sekali terdapat fenomena-fenomena menarik yang terjadi, terutama berkaitan dengan langkah pelibatan masyarakat guna menyelaraskan rencana pengelolaan kebersihan yang dihasilkan.

Dalam proses pengelolaan kebersihan terutama sampah yang dilaksanakan Kota Pekanbaru, khususnya oleh 3 (tiga) instansi yang tercantum dalam Keputusan Walikota Nomor 7 Tahun 2004, banyak sekali terdapat fenomena-fenomena menarik yang terjadi, terutama berkaitan dengan langkah pelibatan masyarakat guna menyelaraskan rencana pengelolaan kebersihan yang dihasilkan. Fenomena itu antara lain:

1. Belum terintegrasinya pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru, dimana kewenangan pengelolaan sampah dibagi ke beberapa Instansi penting, seperti:
 - a. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru
 - b. Dinas Pasar Kota Pekanbaru
 - c. Dinas Pemukiman Sarana dan Prasarana Kota Pekanbaru
2. Kurangnya koordinasi yang dilakukan antara instansi terkait untuk mengelola sampah melalui bentuk-bentuk rapat yang dilakukan, sehingga terjadi peningkatan volume sampah setiap tahunnya yang terlihat pada tabel I.1 diatas.
3. Minimnya sarana dan prasarana kebersihan yang dimiliki Pemerintah Kota Pekanbaru seperti mobil pengangkut sampah, gerobak dan tempat pembuangan sampah (TPS).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penanganan wilayah kebersihan di Kota Pekanbaru serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penanganan wilayah kebersihan di Kota Pekanbaru.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tapi menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data dan informan terpilih serta yang bersangkutan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Penanganan Wilayah Kebersihan Di Kota Pekanbaru. Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan metode *Snowball Sampling*. Metode *Snowball Sampling* adalah metode penentuan sampel yang

pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum dirasa lengkap dalam memberikan data, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder sesuai dengan pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan *key informan* dan informan-informan susulan penelitian mengenai Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Penanganan Wilayah Kebersihan Di Kota Pekanbaru serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Penanganan Wilayah Kebersihan Di Kota Pekanbaru. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru; Dinas Pasar Kota Pekanbaru; dan Dinas Kimpraswil Kota Pekanbaru yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti data hasil pelaksanaan kegiatan Penanganan masalah kebersihan, data monografi Kota Pekanbaru, struktur organisasi instansi terkait dan data-data pendukung lainnya sesuai dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Penanganan Wilayah Kebersihan di Kota Pekanbaru

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada masalah penelitian di dalam latar belakang masalah, yaitu mengenai koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang penanganan wilayah kebersihan di Kota Pekanbaru ternyata belum sesuai dengan harapan dan tujuan yang diinginkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat menanganani dan mengelola kebersihan yang lebih efektif serta untuk dapat menciptakan kebersihan di lingkungan Kota Pekanbaru, maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud perlu ditindaklanjuti dengan membentuk suatu kelembagaan pengelolaan kebersihan dengan melibatkan institusi-institusi yang terkait.

Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melakukan penanganan kebersihan di Kota Pekanbaru. Tujuan dari koordinasi ini sendiri adalah sebagai upaya untuk menyerasikan tugas bersama serta tugas bagian-bagian guna mewujudkan tujuan keseluruhan. Sedangkan jaringan kerja merupakan proses aktif membangun dan mengelola hubungan-hubungan yang luas dan kokoh, baik secara personal maupun secara organisasi. Salah satu permasalahan yang mendasar pada Pemerintah Kota Pekanbaru adalah: Masalah sosial terutama masalah penanggulangan dan pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Sistem penanganan sampah di Kota Pekanbaru masih mengikuti pola konvensional mulai dari kegiatan penyapuan jalan, pewadahan, pengumpulan sampah, penampungan sampah sementara di TPS dan pengangkutan sampah ke TPA Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Tujuan koordinasi merupakan tujuan bersama, kesatuan daripada usaha meminta suatu pengertian kepada individu agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok dimana mereka bekerja. Koordinasi bersangkutan dengan penyerasian serta penyatuan tindakan dari sekelompok orang.

Jadi, sangat jelas bahwa manfaat koordinasi sangat menentukan terselenggaranya usaha yang telah diprogramkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tetapi apabila koordinasi tidak melaksanakan atas departementasi dan pembagian kerja akan menimbulkan organisasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa kesatuan arah. Jadi

koordinasi sangat penting dalam mengarahkan para bawahan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisa dengan menggunakan teori koordinasi dengan indikator variabel penelitian sebagai berikut:

Tanggungjawab

Dengan minimnya koordinasi yang dilakukan, dalam hal ini hanya dengan rapat umum dan inspeksi mendadak, hasil yang dicapai dalam penanganan kebersihan di Kota Pekanbaru oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait belum maksimal.

Secara keseluruhan peneliti dapat menyatakan bahwa tanggungjawab dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penanganan masalah kebersihan belum maksimal. Hal ini terlihat dari hasil kerja yang ada, bahwa masih banyak jalan raya, pasar-pasar dan pemukiman masyarakat belum terpecahkan untuk masalah kebersihan lingkungan. Hendaknya perlu ada upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan tanggungjawab kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang nantinya juga akan berimbas kepada peningkatan kualitas kebersihan di Kota Pekanbaru.

Proses

Karena koordinasi adalah pekerjaan pimpinan atau koordinator yang bersifat kesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Adanya kegiatan-kegiatan yang ingin dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman.

Proses yang dimaksud dalam pelaksanaan kegiatan penanganan kebersihan di Kota Pekanbaru adalah:

- a. Memfasilitasi segala kebutuhan akan kebersihan seperti alat angkut sampah, tempat sampah, mobil pengangkut sampah dan sebagainya.
- b. Mengajak masyarakat untuk ikut serta menjaga lingkungannya karena masyarakatlah merupakan pilar utama untuk menjaga kebersihan di Kota Pekanbaru.

Salah satu koordinasi yang baik dalam proses adalah mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungannya juga memfasilitasi segala aspek kebersihan. Pendekatan utama dalam koordinasi adalah komunikasi, karena dengan pengaturan ruang dan waktu yang memperlancar pencapaian tujuan koordinasi adalah hubungan antara individu ataupun instansi.

Koordinasi juga adalah sebagai suatu proses atau kegiatan secara terus menerus tidak pernah berhenti berupaya untuk menyerahkan, menyelaraskan atau mensinkronisasikan unit – unit yang ada di dalam organisasi. Proses yang harus dijalani agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Apabila dilihat dari arti penting dalam administrasi, koordinasi sangat berhubungan dengan sinkronisasi dan penyatuan gerak dari sekelompok manusia. Suatu aksi yang terkoordinir ialah apabila kegiatan – kegiatan dari semua pihak berjalan harmonis dan saling bertalian serta terpadu menuju tujuan yang jelas.

Pengaturan Secara Teratur

Pengaturan secara teratur daripada usaha kelompok karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan didalam kelompok, bukan terhadap usaha individu. Maka sejumlah daripada individu yang bekerjasama dimana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam

melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi. Dilihat dari kedudukan dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru yang merupakan sebagai koordinator dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menangani wilayah kebersihan dan Dinas lain yang menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam menangani permasalahan kebersihan di Kota Pekanbaru. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok dan fungsi membuat konsepsi manajemen persampahan termasuk pemetaan fasilitas dan penyebaran sampah, menyediakan TPS, mengelola TPA, memberdayakan institusi pengelola kebersihan dan komponen pendukung lainnya dan melakukan *monitoring* secara rutin dan ketat terhadap mobilisasi sampah dan lingkungan.

Sementara itu, Dinas Kimpraswil memiliki tupoksi bertanggungjawab dalam menjaga lingkungan kebersihan terutama pada saluran air, selokan dan anak sungai serta memobilisasi kotoran dan sampah hasil gotong royong masyarakat ke TPA. Selanjutnya, Dinas Pasar memiliki tupoksi menata petugas kebersihan jumlah dan fasilitas sampah termasuk mekanisme penanganannya di lingkungan pasar, bertanggungjawab terhadap kebersihan pasar dan mengangkut sampah dari pasar ke TPA. Secara keseluruhan, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baik itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pemukiman Sarana dan Prasarana Wilayah maupun Dinas Pasar, mempunyai tupoksi yang sama yakni mensosialisasikan secara luas kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 dan program K3 (Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan) dan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan langsung oleh Walikota. Hanya saja, pembagian kewenangan terhadap ketiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut membuat penanganan kebersihan di Kota Pekanbaru menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, penanganan kebersihan di Kota Pekanbaru tidak harus selalu menjadi tanggung jawab instansi terkait, melainkan harus menjadi kesadaran bersama masyarakat Kota Pekanbaru.

Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan merupakan usaha berarti dari pimpinan untuk mengatur sedemikian rupa usaha-usaha kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian didalam mencapai hasil dengan mengatur jadwal waktu yang telah direncanakan. Hal ini bisa dibuat dari tanpa adanya kesatuan tindakan antar bagian yang bertugas, usaha pelaksanaan koordinasi dalam melakukan penanganan kebersihan akan sulit dilakukan. Dengan adanya kesatuan tindakan tanpa adanya koordinasi yang baik dari setiap bagian, penanganan kebersihan di Kota Pekanbaru juga tidak akan bisa tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, oleh karena itu kesatuan tindakan dan koordinasi dalam suatu kegiatan saling berkaitan.

Jika terjadi sesuatu tentang kebersihan maka Dinas Kebersihan sebagai koordinator memberikan petunjuk tentang masalah kebersihan yang dihadapi, maka suatu masalah dalam hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu perlu diadakannya rapat untuk memberikan arah kegiatan kepada instansi atau Dinas yang tergabung dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta solusi yang harus dilakukan.

a. Kesatuan Tindakan di Bidang Pengangkutan Sampah

Dalam pelaksanaan pengangkutan sampah yang telah menumpuk di TPS, untuk memudahkan mengambil dan mengangkut atau membuangnya ke TPA Muara Fajar dan

TPS Kulim Atas diperlukan armada angkutan beserta alat dan petugas kebersihan yang siap pakai, oleh karena itu penataan administrasi operasional pengangkutan sampah perlu dilakukan agar kinerja dapat berjalan dengan baik, tugas dibidang ini sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 7 Tahun 2004 dilakukan oleh Dinas-Dinas yang masuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani pelaksanaan wilayah kebersihan. Untuk kelancaran di bidang ini Pemerintah Kota perlu memberikan perhatian terhadap pengadaan sarana angkutan sampah yang kondisinya saat ini sangat kurang jumlahnya.

Koordinasi dibidang pengangkutan sampah telah tersistem, terjadwal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tugas pengangkutan, pengambilan sampah TPS sudah diatur jadwal jam keberangkatan mulai bertugas pukul 05.00 pagi sampai dengan pukul 07.00 pagi dan sore hari pukul 16.00 sampai dengan selesai dan diatur dalam 2 shif. Koordinasi selalu dilakukan dan dijalankan, namun aktivitas pengangkutan sampah tersebut sering juga tidak lancar, hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah armada yang siap jalan, kondisi armada angkutan sampah banyak yang sudah tua tidak layak jalan, fenomena negatif ini kalau tidak segera diatasi maka pengangkutan sampah bisa terhenti, pengangkutan sampah efektif dan efisien ditentukan oleh kinerjanya apabila kecepatan waktu angkut terpenuhi, ketepatan waktu perjalanan dari TPS ke TPA, kondisi armada laik jalan dan keandalan petugas mencapai waktu yang telah ditentukan.

Koordinasi pengangkutan sampah yang ada di Kota Pekanbaru khususnya penanganan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pasar dan Dinas Kimpraswil ini merupakan solusi pembersihan terhadap tumpukan sampah di TPS dan ditempat lain yang bukan tempat pembuangan sampah, yang saat ini kondisinya parah, tidak hanya merusak pemandangan, bau sampah yang menyengat sudah menyebar luas. Oleh karena itu upaya pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dan pihak Dinas Pasar juga Dinas Kimpraswil Kota Pekanbaru dalam menjalankan koordinasi untuk pengangkutan berusaha mengurangi volume sampah menumpuk dengan melibatkan peran aktif warga masyarakat dan para dunia industri/usaha, perumahan agar tetap menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing sehingga terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, inilah yang disebut penanganan sampah berbasis masyarakat dapat dikurangi atau dengan cara daur ulang, dilokasi TPA Muara Fajar dan Kulim Atas sehingga volume sampah jumlahnya dapat ditekan.

b. Kesatuan Tindakan Pembersihan Tumpukan Sampah di Lingkungan Pasar dan Drainase

Koordinasi yang dibuat oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dengan Dinas pasar dalam upaya menanggulangi sampah agar berkurang untuk mengelola sampah agar semua bersih dan untuk mengangkut sampah agar semua sampah dapat terangkut bersih yang ada di TPS Pasar Cik Puan maupun yang ada dipinggir jalan, maka dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dan Dinas Pasar bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk mengurangi tumpukan sampah yang ada di Pasar Cik Puan maka berupaya keras agar bersih dari sampah, maka memberi penyuluhan ke tempat awal sumber sampah sehingga warga masyarakat senantiasa menjaga kebersihan di lingkungannya. nilai-nilai K3 adalah Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Nilai-nilai K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) bisa ditekankan pada masyarakat di suatu lingkungan dengan secara bertahap, yaitu adalah perlu ditekankannya ketertiban pada masyarakat. Ketertiban tersebut juga harus dilaksanakan dari hal-hal terkecil terlebih dahulu seperti buang sampah pada tempatnya dan yang lainnya, sampai hal-hal yang besar lainnya. Dan setelah ketertiban maka akan tercapai

kebersihan lingkungan, bersih dari sampah, pencemaran dan lainnya. Setelah tercapai kebersihan maka akan memberikan kesan bernilai keindahan pada lingkungan.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penanganan Wilayah Kebersihan Di Kota Pekanbaru

Kesatuan Tindakan

Pada hakikatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri – sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Kesatuan daripada usaha, berarti bahwa pimpinan harus mengatur sedemikian rupa usaha – usaha daripada kegiatan tiap individu sehingga terdapat adanya keserasian didalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu yang telah direncanakan.

Komunikasi

Dalam pelaksanaan suatu koordinasi, sangat diperlukan suatu komunikasi yang lancar antar pihak yang mengelola dalam membuat tupoksi agar terjalin suatu hubungan kerja sama yang harmonis guna kelancaran pelaksanaan penanganan kebersihan. Komunikasi dapat membantu pelaksanaan perencanaan yang telah dibuat Pemerintah. Dari komunikasi ini diharapkan kepada pihak-pihak yang membuat peraturan ini mengerti akan tujuan dari perencanaan yang telah dibuat. Dimana pentingnya komunikasi merupakan alat untuk memperlancar kegiatan pelaksanaan koordinasi yang dilakukan. Agar dalam pelaksanaan koordinasi terdapat keselarasan, keserasian dan kerjasama yang baik, maka seluruh pihak-pihak yang ikut dalam rapat koordinasi harus mampu mengkomunikasikan segala sesuatunya. Komunikasi yang paling penting dalam pelaksanaan koordinasi adalah dengan diadakannya rapat-rapat atau pertemuan yang sifatnya memberikan input dalam menjalankan tugas dari pihak-pihak yang ikut dalam pelaksanaan tersebut.

Pembagian Kerja

Dengan adanya pembagian kerja dan hubungan kerjasama dalam menjalankan tupoksi, diharapkan dapat terealisasikan dan pelaksanaan tugas serta misi yang sudah digariskan dapat terwujud. Untuk menciptakan koordinasi antar kelompok dalam bentuk kerjasama pembagian kerja perlu diklasifikasikan dengan baik.

Jumlah Penduduk Yang Padat

Karena pertumbuhan ekonomi lokal semakin berkembang, peluang kesempatan kerja cukup tinggi, maka para pendatang dari daerah lain yang jumlahnya cukup tinggi akan berdampak terhadap pertumbuhan volume sampah di dalam kota. Artinya jumlah penduduk terus meningkat hal ini akan mengancam pertumbuhan timbunan sampah, akan sulit dikendalikan koordinasi penanggulangan kebersihan. Padatnya jumlah penduduk merupakan penghambat terhadap koordinasi pengendalian kebersihan. Oleh karena itu penduduk (pedagang, pengguna jalan) sulit untuk menertibkan pembuangan sampah-sampahnya disembarang tempat, disamping itu tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungannya sangat rendah.

Kesadaran Masyarakat

Rendahnya kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat ditandai dengan tidak pedulinya masyarakat terhadap kebersihan tempat tinggalnya masing-masing dan lingkungannya. Setiap orang dalam organisasi bekerja berdasarkan motivasi yang ada didalam dirinya, melalui motivasi pegawai terdorong untuk melakukan suatu

pekerjaan, kalau pegawai tidak mempunyai motivasi karena kebutuhan hidupnya tidak memadai, maka motivasi kerja sangat rendah.

Disiplin Aparat

Fenomena ini juga membuktikan bahwa sering terjadi pelanggaran disiplin kerja yang dilakukan oleh petugas dan pengawas dan hal ini menyebabkan tertundanya pelaksanaan tugas atau pekerjaan. Kondisi ini juga mencerminkan kurang disiplinnya petugas kebersihan Dinas Kimpraswil Kota Pekanbaru, akibat lambatnya unsur pengawasan melekat dari atasan langsung yang bertanggung jawab dibidang kebersihan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa angka tersebut cukup tinggi , tentunya dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan koordinasi penanganan kebersihan, ketidak disiplin dan lemahnya pengawasan diakibatkan karena kurangnya manajemen kinerja, rendahnya insentif yang diterima petugas kebersihan, tidak memadai fasilitas atau sarana dan prasarana kebersihan, lemahnya pengawasan yang merupakan daya dukung penyelenggara kegiatan kebersihan.

Motivasi Kerja

Untuk membuat pegawai Dinas Kebersihan langsung terlibat dalam penanganan wilayah kebersihan perlu adanya koordinasi dan pemberian motivasi dari pimpinannya untuk bekerja dengan semangat, maka unsur kebutuhan ekonomi dan faktor pengawasan juga perlu dilakukan untuk keberhasilan penanganan kebersihan di Kota Pekanbaru.

Pengangkutan sampah, yang datangnya dari internal organisasi yaitu masih adanya petugas yang tidak masuk kantor, terlambat datang, keluar masuk kantor cepat, kondisi ini perlu koordinasi dan perubahan dari manajemen sebagai pimpinan dalam organisasi.

Sumber Daya Manusia

Faktor terpenting dalam mengadakan koordinasi adalah adanya sumber daya manusia yang merupakan kekayaan yang paling penting yang dimiliki suatu organisasi. Untuk kelancaran suatu koordinasi dibutuhkan manusia yang produktif, serta kemampuan manusianya yang handal sebagai pengelola yang profesional dalam hal ini pihak – pihak yang terkait dalam koordinasi SKPD penanganan kebersihan dalam menjalankan tupoksinya.

Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Dalam suatu koordinasi juga dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung, pelaksanaan dari tugas-tugas yang tetap akan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kesimpulan yang dapat di ambil adalah pelaksanaan koordinasi dalam penanganan kebersihan di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik, dikarenakan status para instansi terkait yang bersifat horizontal atau sejajar, dapat dilihat dari indikator koordinasi baik adanya tanggungjawab, proses, pengaturan secara teratur, kesatuan tindakan, dan tujuan koordinasi dikategorikan belum baik. Dari 5 (Lima) indikator yang terdapat koordinasi, yang terpenuhi adalah 4 (Empat) indikator, dan 1 (Satu) indikator belum terpenuhi.

Kemudian yang menjadi faktor penghambat terhadap koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penanganan wilayah kebersihan di Kota Pekanbaru, antara lain:

- a. Jumlah personil yang terbatas
- b. Kurangnya pengawasan di lapangan
- c. Disiplin aparat kebersihan

- d. Motivasi aparat masih rendah
- e. Terbatasnya anggaran operasional kebersihan
- f. Kurangnya sarana dan prasarana kebersihan
- g. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan.

Sehingga sulit untuk melaksanakan koordinasi secara maksimal karena faktor penghambat tersebut diatas, namun Pemerintah Kota Pekanbaru harus tetap mempertimbangkan faktor penghambat sesuai kondisi yang dihadapi dilapangan, maka diperlukan menjalankan fungsi – fungsi manajemen untuk menjalankan koordinasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Handoko, T Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manulang. 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marnis. 2008. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: UNRI Press.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rianto, Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutarto. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Sistem Administrasi Negara Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, George R. 2006. *Asas-Asas Menejemen*. Bandung: PT. Alumni.
- _____. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Altenasyah, 2012. *Koordinasi Dalam Membuat Peraturan Kepenghuluan di Kepenghuluan Sungai Pinang Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir*.
- Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 07 Tahun 2004. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru